The Elementary Journal
Vol. 4 No. 2, (May-October, 2026). Page. 113-120
ISSN: 2987-0801, DOI: https://doi.org/10.56404/tej.v4i2.387

Evaluasi Transformasi Kurikulum Merdeka: Kesenjangan Antara Regulasi Ideal dan Implementasi Aktual di Sekolah Dasar

Aanisah Agusnani Rizq[1], Agus Pahrudin[2], Sri Rahmi[3]
[1]UIN Raden Intan Lampung
[2]UIN Raden Intan Lampung
[3]UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Article Info

Article history:

Received April 28, 2026.
Revised July 07, 2026.
Accepted October 15, 2026.

Keywords:

Ideal Curriculum
Actual Curriculum
Education Report Card
Surah As-Saff
Itqan

ABSTRACT

This study aims to analyze the gap between the Ideal Curriculum (intended curriculum) within the Merdeka Curriculum policy (Permendikbudristek No. 12 of 2024) and the Actual Curriculum (implemented curriculum) at the elementary school level through the lens of Islamic Education Management (MPI). Employing a literature review method, this research synthesizes various national regulatory documents and aggregate data from the Computer-Based National Assessment (ANBK) in the Education Report Cards over the last five years (2021–2025). The results indicate that although there is a national upward trend in students' literacy and numeracy competencies, the reality on the ground is still characterized by wide regional quality disparities. This gap is triggered by the massive digital administrative burden on teachers and the emergence of a hidden curriculum in the form of visual accountability formalities, which reduces the essence of differentiated learning and character projects (P5). In the perspective of MPI, this discrepancy serves as a theological reflection on the warning in the Qur'an, Surah As-Saff verses 2-3, regarding the misalignment between regulations (qawl) and actions (fi'il). As a solution, this study recommends the debureaucratization of teachers' workloads and the reinforcement of exemplary-based instructional leadership by principals (uswatun hasanah) to achieve moral accountability (amanah) and profound quality (itqan).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan (gap) antara Kurikulum Ideal (intended curriculum) dalam kebijakan Kurikulum Merdeka (Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024) dengan Kurikulum Aktual (implemented curriculum) di tingkat Sekolah Dasar (SD) melalui kacamata Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mensintesis berbagai dokumen regulasi nasional dan data agregat hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) pada Rapor Pendidikan selama periode lima tahun terakhir (2021–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara nasional terdapat tren peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa, realitas di lapangan masih ditandai oleh disparitas mutu antarwilayah yang lebar. Kesenjangan ini dipicu oleh beban administrasi digital guru yang masif dan munculnya hidden curriculum berupa formalitas akuntabilitas visual, sehingga mereduksi esensi pembelajaran berdiferensiasi dan projek karakter (P5). Dalam perspektif MPI, kesenjangan ini menjadi refleksi teologis atas peringatan dalam Al-Qur'an Surah As-Saff ayat 2-3 tentang ketidakselarasan antara regulasi (kaul) dan tindakan (fi'il). Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan debirokratisasi beban kerja guru serta penguatan kepemimpinan instruksional kepala sekolah berbasis keteladanan (uswatun hasanah) guna mewujudkan akuntabilitas moral (amanah) dan kualitas yang mendalam (itqan).

Corresponding Author:
Aanisah Agusnani Rizq,
agusnani94@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan fase krusial yang berfungsi sebagai fondasi utama (foundation skills) bagi pembentukan kemampuan kognitif, karakter, dan pemikiran kritis peserta didik. Kegagalan dalam menuntaskan kompetensi dasar pada fase ini akan memicu efek domino berupa krisis pembelajaran (learning crisis) yang berkepanjangan pada jenjang pendidikan berikutnya. Sebagai langkah transformatif dalam memulihkan mutu pendidikan nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Kurikulum Merdeka secara nasional melalui Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024. Kurikulum ini didesain mengutamakan materi esensial, fleksibilitas melalui pembelajaran berbasis fase, dan orientasi pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila.

Secara konseptual, keberhasilan suatu kurikulum sangat bergantung pada harmonisasi antara dua dimensi utama, yaitu kurikulum ideal (ideal/intended curriculum) dan kurikulum aktual (actual/implemented curriculum). Kurikulum ideal merupakan cetak biru, regulasi resmi, dan ekspektasi capaian yang dirancang oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, kurikulum aktual adalah realitas pengalaman belajar yang benar-benar dialami dan diterima oleh siswa di dalam ruang kelas. Penilaian terhadap mutu kurikulum aktual ini secara nasional diukur melalui instrumen Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang melahirkan Rapor Pendidikan.

Namun, tren data Rapor Pendidikan hasil ANBK menunjukkan adanya disparitas yang nyata antara idealitas kebijakan dengan realitas di lapangan. Data hasil ANBK menunjukkan potret kemampuan literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar di Indonesia yang masih bergerak lambat dan fluktuatif.

Pasca penurunan skor membaca pada PISA, hasil ANBK nasional menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan literasi dasar siswa SD belum merata, dengan sebagian besar sekolah di daerah sub-urban dan pedesaan masih berada pada kategori "Dasar" (baru mampu menemukan informasi tersurat sederhana).

Sementara kemampuan numerasi siswa SD didapati mengalami stagnasi dan kerap berada di bawah nilai ideal capaian kompetensi minimum. Rapor Pendidikan menegaskan adanya kesenjangan (gap) kualitas hasil belajar yang lebar antarwilayah dan kelompok sosial-ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa fleksibilitas desentralisasi kurikulum belum berbanding lurus dengan pemerataan kualitas output di lapangan.

Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya gap yang signifikan antara kurikulum ideal dan kurikulum aktual di tingkat Sekolah Dasar. Secara ideal, Kurikulum Merdeka menuntut guru SD yang mayoritas merupakan guru kelas untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi (differentiated learning) berbasis asesmen diagnostik guna memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Kurikulum ideal juga mewajibkan pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai sarana penumbuhan nalar kritis siswa melalui pembelajaran berbasis proyek interdisipliner.

Namun secara aktual di lapangan, realitas ruang kelas Sekolah Dasar menampilkan kondisi yang bertolak belakang. Guru kelas SD mengalami beban kerja transisi yang berat dan terjebak pada pemenuhan administrasi digital. Akibatnya, pembelajaran berdiferensiasi gagal diterapkan dan proses mengajar kembali ke pola konvensional (seragam) demi mengejar ketuntasan materi buku teks. Selain itu, pelaksanaan P5 secara aktual sering kali mengalami miskonsepsi; alih-alih fokus pada proses pembentukan karakter, proyek tersebut justru kerap direduksi sekadar menjadi ajang pameran produk fisik yang membebani finansial siswa. Situasi ini diperparah oleh intervensi kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) berupa budaya formalitas di sekolah yang lebih memprioritaskan validasi dokumen administrasi di atas platform digital daripada substansi kualitas interaksi kelas.

Jika kesenjangan antara regulasi ideal dan implementasi aktual di Sekolah Dasar ini terus dibiarkan tanpa adanya evaluasi transformatif, maka Kurikulum Merdeka dikhawatirkan hanya akan menjadi dokumen mati di atas kertas tanpa mampu menyelesaikan krisis pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian berbasis studi literatur ini krusial dilakukan untuk membedah akar penyebab terjadinya gap tersebut serta merumuskan langkah strategis manajerial dalam mengorkestrasi transformasi pendidikan di Sekolah Dasar.

Dalam perspektif pendidikan Islam, dikotomi dan kesenjangan antara idealitas konsepsional (*ideal curriculum*) dengan realitas implementatif (*actual curriculum*) pada dasarnya telah diwanti-wanti oleh Al-Qur'an. Secara epistemologis, Al-Qur'an memuat pedoman, hukum, dan syariat yang merupakan bentuk cetak biru atau "kurikulum ideal" bagi kehidupan manusia. Namun, nilai ideal tersebut menuntut adanya aktualitas yang selaras dalam tindakan nyata. Kritik Allah SWT terhadap kesenjangan antara apa yang tertulis/diucapkan (ideal) dengan apa yang senyatanya dilakukan (aktual) digambarkan secara tegas dalam Surah As-Saff (61) ayat 2-3: *"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."* Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa sebuah konsep, regulasi, atau kurikulum—termasuk Kurikulum Merdeka—yang tampak sempurna di atas kertas dokumen (preskriptif), akan kehilangan keberkahan dan substansinya apabila gagal diaktualisasikan (deskriptif) secara jujur di ruang kelas.

Transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka yang menekankan penumbuhan fitrah, potensi unik anak, dan akhlak mulia sejalan dengan isyarat Surah Ar-Rum (30) ayat 30 mengenai pendidikan berbasis

fitrah, serta Surah Al-Furqan (25) ayat 74 yang berorientasi pada pembentukan *output* generasi yang ideal (*Imaman lil Muttaqin*). Di dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW diutus bukan sekadar membawa dokumen wahyu yang ideal, melainkan berperan sebagai "manajer kurikulum aktual" dan uswatun hasanah yang mempraktikkan wahyu tersebut secara nyata ke dalam pembentukan karakter para sahabat.

Oleh karena itu, evaluasi untuk mereduksi *gap* antara regulasi ideal Kemendikbudristek dengan implementasi aktual di Sekolah Dasar bukan hanya sekadar tuntutan pemenuhan mutu administratif kenegaraan, melainkan sebuah tanggung jawab moral-spiritual (*Rabbaniyah-Insaniyah*) untuk memastikan bahwa proses tarbiyah di tingkat dasar benar-benar berjalan secara efektif, jujur, dan berpusat pada pemulihan kemampuan hakiki peserta didik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review atau studi kepustakaan). Menurut Zed [1], studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan secara langsung. Metode ini dipilih untuk mengevaluasi secara kritis dan mendalam mengenai adanya kesenjangan (gap) antara regulasi ideal (intended curriculum) dan implementasi aktual (implemented curriculum) pada Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Dasar. Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis adaptasi dari model Machi dan McEvoy [2], yaitu:

1) Identifikasi Topik dan Penentuan Rumusan Masalah
   Tahap awal dimulai dengan memetakan urgensi manajemen kurikulum di tingkat Sekolah Dasar yang dihadapkan pada krisis pembelajaran (*learning crisis*). Fokus masalah diarahkan pada evaluasi dimensi-dimensi kurikulum, khususnya perbandingan antara kurikulum ideal (konsep preskriptif) dengan kurikulum aktual (konsep deskriptif).
2) Penelusuran dan Pengumpulan Sumber Literatur
   Pengumpulan data pustaka dilakukan dengan teknik dokumentasi melalui penelusuran digital pada database jurnal bereputasi (seperti *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Garuda*), serta dokumen kebijakan resmi..
   Kriteria inklusi literatur yang dipilih adalah:
   - Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam rentang waktu terbaru (termasuk tren data mutu pendidikan terkini).
   - Dokumen regulasi resmi dari Kemendikbudristek terkait Kurikulum Merdeka (seperti Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024).
   - Data empiris berskala nasional berupa laporan hasil ANBK dan Rapor Pendidikan.
   - Buku-buku teks fundamental mengenai teori dan komponen kurikulum dari para tokoh ahli seperti S. Hamid Hasan, George A. Beauchamp, Oumar Hamalik, dan S. Nasution.
3) Evaluasi dan Penyaringan Data (*Screening*)
   Dari puluhan sumber literatur yang ditemukan, dilakukan penyaringan secara ketat untuk memilih teks yang paling relevan. Data empiris mengenai hasil capaian literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar dikonfrontasikan langsung dengan regulasi ideal Kurikulum Merdeka. Selain itu, literatur disaring untuk melihat bagaimana intervensi kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) ikut memengaruhi aktualitas pembelajaran di kelas.
4) Analisis dan Sintesis Data
   Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kritis dan komparatif. Peneliti mengorganisasikan data secara tematis ke dalam beberapa fokus pembahasan, yaitu:
   - Karakteristik kurikulum ideal Sekolah Dasar dalam kebijakan Kurikulum Merdeka.
   - Realitas kurikulum aktual berdasarkan data hasil ANBK.
   - Faktor-faktor manajerial dan sosiologis penentu terjadinya kesenjangan (*gap*) di lapangan.

   Selanjutnya, data tersebut disintesis dengan pisau analisis teori dimensi kurikulum , integrasi nilai nilai keislaman dari Al-Qur'an (seperti konsep keselarasan ucapan dan perbuatan dalam QS. As-Saff: 2-3), serta pemikiran tokoh pendidikan Islam (seperti Al-Attas [11] dan Muhaimin [10]). Tahap akhir dari metodologi ini adalah menarik kesimpulan deduktif-induktif yang menghasilkan rekomendasi transformatif guna mereduksi disparitas kurikulum demi memulihkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data rapor pendidikan selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Rapor pendidikan tahun 2021 sampai 2025

Indikator Rapor Pendidikan	ANBK 2021	ANBK 2022	ANBK 2023	ANBK 2024	ANBK 2025	Status Mutu Nasional
Kemampuan Literasi	53,42%	59,49%	68,05%	70,03%	71,20%	Baik (Melampaui target psikologis 70%)
Kemampuan Numerasi	41,70%	45,24%	62,31%	67,94%	68,50%	Sedang (Meningkat pesat dari pasca-pandemi)

Sumber : raporpendidikan.kemdikbud.go.id

Analisis tren capaian 5 tahun terakhir menunjukkan hasil awal perilisan Rapor Pendidikan (data ANBK 2021), angka capaian menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan akibat dampak kehilangan pembelajaran (*learning loss*) selama pandemi COVID-19. Hanya 53,42% siswa SD yang kompeten di bidang literasi dan 41,70% di bidang numerasi. Pada tahun berikutnya (ANBK 2022), grafik mulai merangkak naik secara bertahap seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial dan adopsi awal kurikulum darurat. [29]

Peningkatan signifikan terjadi pada hasil ANBK 2023 dan dikukuhkan pada rilis Rapor Pendidikan terbaru (data ANBK 2024). Capaian literasi melompat melewati ambang batas psikologis nasional hingga menyentuh 70,03%, sementara kemampuan numerasi dasar meningkat tajam ke angka 67,94%.

Faktor utama pendorong lompatan manajerial ini meliputi:

- Masifnya penyaluran Buku Bacaan Bermutu langsung ke sekolah-sekolah dengan rapor merah/rendah.
- Pemanfaatan akun pembelajaran dan transformasi sistem evaluasi guru melalui Perencanaan Berbasis Data (PBD) di platform Rapor Pendidikan.
- Perluasan pendampingan guru kelas melalui keterlibatan mahasiswa dalam program Kampus Mengajar.

Data proyeksi performa tahun terakhir menunjukkan tren penguatan yang stabil, di mana ekosistem sekolah dasar mulai terbiasa dengan karakteristik soal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) yang berbasis pada logika penalaran, bukan lagi berbasis hafalan materi teks. Meskipun angka nasional mengalami kenaikan grafis yang impresif, laporan evaluasi sistem pendidikan dari *Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP)* menekankan bahwa angka rata-rata ini masih menyembunyikan disparitas (kesenjangan) antarwilayah.

Sekolah-sekolah dasar di wilayah urban (perkotaan) dan Pulau Jawa mencatatkan skor yang sangat tinggi, sedangkan wilayah sub-urban, pedesaan, dan daerah 3T masih berjuang di batas kompetensi minimum bawah. Dalam perspektif MPI, pengentasan gap pemerataan kualitas ini merupakan perwujudan dari nilai Keadilan (*'Adalah*) dan Amanah kepemimpinan pengelolaan pendidikan publik.

Kurikulum Ideal adalah kurikulum yang dicita-citakan, tertuang dalam dokumen resmi (cetak biru) dengan harapan hasil yang sempurna. Sementara Kurikulum aktual realita yang terjadi di kelas. Seringkali terdapat kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang benar-benar diterima siswa karena keterbatasan sarana, kompetensi guru, atau waktu. [3]

Dalam ranah pengembangan kurikulum, perbedaan antara apa yang direncanakan secara tertulis dengan apa yang benar-benar terjadi di ruang kelas merupakan diskursus yang panjang. John Goodlad [4] dalam karya klasiknya Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice, membagi kurikulum menjadi beberapa tingkatan ekologis. Dua di antaranya adalah:

1. *Formal/Ideal Curriculum*: Kurikulum yang direkayasa oleh sosiolog dan pembuat kebijakan (dalam konteks ini adalah Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Merdeka).
2. *Operational/Actual Curriculum*: Kurikulum yang benar-benar diwujudkan oleh guru dalam interaksi pembelajaran sehari-hari.

Senada dengan Goodlad, pakar kurikulum Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins [5] dalam buku Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, menegaskan bahwa implementasi kurikulum bukan sekadar proses mekanis pemindahan dokumen ke dalam kelas. Implementasi adalah proses dinamis yang melibatkan adaptasi, negosiasi, dan sering kali mengalami reduksi akibat kesiapan kapasitas aktor di lapangan.

Ketika pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai "Kurikulum Ideal" dengan karakteristik fleksibilitas fase, pembelajaran berdiferensiasi, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), kebijakan tersebut berbenturan dengan realitas kesiapan guru di tingkat sekolah dasar. Data Rapor Pendidikan nasional (2021-2025) yang memperlihatkan fluktuasi serta lambatnya pemerataan mutu numerasi merupakan bukti empiris adanya *gap* (jurang pemisah) antara wilayah teoritis-idealistik dengan wilayah praktis-aktual. [30]

Menurut A. Michael Connelly dan D. Jean Clandinin [6] dalam Teachers as Curriculum Planners menjelaskan bahwa guru adalah curriculum maker yang sesungguhnya di lapangan. Sebagus apa pun dokumen kurikulum ideal dirancang, pada akhirnya ia akan disaring melalui personal practical knowledge (pengetahuan praktis personal) masing-masing guru.

Di jenjang Sekolah Dasar, beberapa faktor yang menyebabkan Kurikulum Aktual tidak berjalan selaras dengan Kurikulum Ideal antara lain:

1. Kebijakan pembelajaran berdiferensiasi (differentiated learning) sering kali direduksi menjadi sekadar membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok statis tanpa adanya asesmen formatif yang berkelanjutan. Penelitian oleh Sanjaya [7] dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran, menyebutkan bahwa kecenderungan guru di Indonesia masih terjebak pada subject-centered curriculum (kurikulum berbasis penguasaan materi tekstual) demi mengejar ketuntasan administratif, daripada mengembangkan kemampuan penalaran (thinking skills) siswa.
2. Reduksi Nilai P5: Fenomena salah kaprah pelaksanaan P5 di tingkat Sekolah Dasar yang terjebak pada produk fisik atau gelar karya yang konsumtif merupakan bentuk dari apa yang disebut wacana performativitas. Guru dan sekolah merasa "aktualisasi" kurikulum telah berhasil jika mampu memamerkan hasil produk yang terlihat oleh mata (bersifat artifisial), padahal esensi kurikulum ideal P5 adalah penanaman karakter dan nalar kritis (*critical thinking*) yang abstrak dan membutuhkan proses panjang. [31]

Kesenjangan antara kurikulum ideal dan aktual diperparah oleh munculnya hidden curriculum (kurikulum tersembunyi). Pasi Sahlberg [8] dalam studinya tentang reformasi pendidikan global (Finnish Lessons), mengingatkan bahwa penekanan yang berlebihan pada standardisasi akuntabilitas berbasis digital dapat membunuh otonomi pedagogis guru.

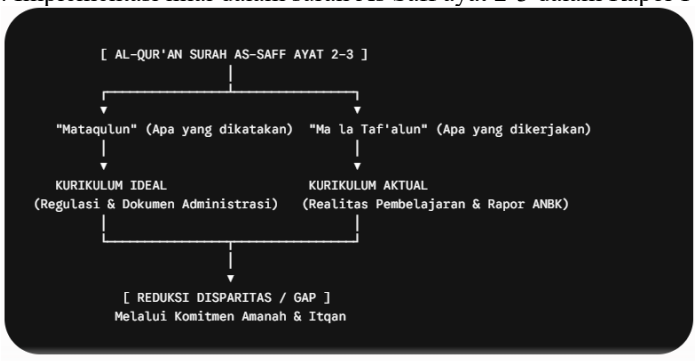
Di Indonesia, kehadiran berbagai platform digital kementerian memaksa guru menghabiskan waktu produktifnya demi mengisi borang administrasi dan validasi data agar status Rapor Pendidikan sekolah mereka terlihat "hijau". Menurut teori kurikulum W. B. Schubert [9], kondisi ini menciptakan null curriculum (kurikulum yang sengaja atau tidak sengaja tidak diajarkan), di mana waktu emas guru untuk membimbing kemampuan membaca mendalam (literasi) dan logika matematika dasar (numerasi) anak-anak SD akhirnya terkorbankan demi kepatuhan birokrasi digital.

Dalam diskursus Manajemen Pendidikan Islam (MPI), dikotomi antara rencana yang ideal dan fakta yang aktual bukan sekadar masalah teknis-manajerial, melainkan sebuah problem moral dan spiritual yang mendasar. Pola kesenjangan antara Kurikulum Ideal (*intended curriculum*) dalam kebijakan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 dan Kurikulum Aktual (*implemented curriculum*) yang tercermin dari fluktuasi serta disparitas data Rapor Pendidikan nasional (2021-2025) sangat tepat dianalisis menggunakan kritik teologis yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah As-Saff (61) ayat 2-3:

"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (QS. As-Saff: 2-3).

Secara tekstual (*lafzhiyyah*), ayat ini diturunkan sebagai teguran keras terhadap ketidakselarasan antara ucapan, janji, atau rencana dengan tindakan nyata di lapangan. Jika ditarik ke dalam konteks manajemen kurikulum, konsep *Kurikulum Ideal* yang diwujudkan dalam bentuk dokumen regulasi, naskah akademik yang megah, jargon-jargon transformasi pembelajaran, serta rancangan administrasi digital merupakan representasi dari "apa yang dikatakan" (*kaul*). Sementara itu, *Kurikulum Aktual* berupa proses belajar riil yang dialami anak di kelas serta capaian literasi-numerasi konkret dalam Rapor Pendidikan adalah bentuk dari "apa yang dikerjakan" (*fi'il*).

Gambar 1. Implementasi nilai dalam surah As Saff ayat 2-3 dalam Rapor Pendidikan



Ketika dunia pendidikan dasar di Indonesia terjebak pada formalitas pemenuhan berkas administrasi di berbagai platform digital demi membuat indikator Rapor Pendidikan sekolah tampak "hijau" di atas kertas,

sementara di ruang kelas guru kembali menggunakan metode ceramah seragam dan mengabaikan hakikat pembelajaran berdiferensiasi, maka terjadilah apa yang diperingatkan dalam ayat tersebut. Manajemen pendidikan kehilangan berkah (barakah) dan substansinya karena terjebak pada wacana performativitas artifisial. Allah SWT menegaskan bahwa ketidakselarasan ini memicu "*kabura maqtan*" (kemurkaan/kebencian yang besar), yang dalam konteks sistem pendidikan bermanifestasi menjadi kegagalan sistemik, stagnasi mutu numerasi, dan ketidakadilan (disparitas) mutu antarwilayah.

Islam memandang kurikulum bukan sekadar cetak biru yang pasif, melainkan sebuah Amanah yang wajib ditunaikan secara utuh (*kaffah*). Rasulullah SAW dalam sejarah peradaban Islam tidak pernah memisahkan antara wahyu yang diterima (konsep ideal) dengan implementasi akhlak dan pendidikan sehari-hari (aktual). Beliau adalah *Uswatun Hasanah* (manajer kurikulum aktual terbaik) yang mengorkestrasi setiap nilai teologis menjadi tindakan nyata. Oleh karena itu, prinsip *Itqan* (profesional dan berorientasi pada kualitas mendalam) serta *Shidq* (kejujuran dalam keselarasan antara dokumen administrasi dan realitas mengajar) harus dijadikan ruh baru dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Manajemen Pendidikan Islam menawarkan resolusi transformatif yang melampaui pendekatan birokratis sekuler untuk menjembatasi jurang pemisah antara kurikulum :

1. Rekonsiliasi Niat dan Orientasi Akuntabilitas (Tafakkur Teologis)
   Sistem evaluasi sekolah melalui Rapor Pendidikan tidak boleh direduksi sekadar sebagai instrumen kepatuhan birokrasi digital. Kepala sekolah dan pengawas harus mengubah paradigma berpikir para guru; dari yang semula memenuhi administrasi demi penilaian manusia, digeser menjadi tanggung jawab moral-spiritual kepada Allah SWT (*Muraqabah*). Keberhasilan kurikulum aktual diukur dari seberapa besar fitrah, karakter, dan kemampuan penalaran membaca serta berhitung anak didik berkembang secara nyata di dalam kelas. [32]
2. Debirokratisasi Kerja Guru (Perspektif Al-Attas)
   Meminjam konsep pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas mengenai esensi pendidikan Islam (*ta'dib*), guru kelas di Sekolah Dasar wajib dikembalikan kepada marwahnya sebagai *Mu'addib* (penanam adab dan karakter) dan *Murabbi* (pengasuh fitrah perkembangan anak). Beban administrasi digital yang menjebak guru dalam formalitas *kaul* (kata-kata/dokumen) harus dipangkas secara manajerial oleh pembuat kebijakan, sehingga guru memiliki alokasi waktu emas yang cukup untuk melakukan tindakan nyata (*fi'il*) berupa bimbingan literasi dasar serta intervensi numerasi yang adaptif.
3. Kepemimpinan Instruksional yang Berbasis *Sidiq* dan *Amanah*
   Kepala Sekolah Dasar sebagai manajer tingkat satuan pendidikan tidak boleh menutup mata terhadap *hidden curriculum* berupa budaya formalitas asal bapak senang (ABS) dalam pelaporan dokumen sekolah. Pemimpin pendidikan Islam harus menerapkan pola pengawasan yang suportif (supervisi klinis), mendampingi guru kelas dalam mengatasi miskonsepsi penerapan P5 dan pembelajaran berdiferensiasi, serta memastikan bahwa data Rapor Pendidikan yang dilaporkan merupakan cerminan objektif dan jujur dari kondisi riil di lapangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara Kurikulum Ideal (intended curriculum) sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 dan Kurikulum Aktual (implemented curriculum) di tingkat Sekolah Dasar. Prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, diferensiasi, dan penguatan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten. Meskipun data Rapor Pendidikan periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan capaian literasi dan numerasi, disparitas mutu antardaerah masih terjadi, terutama pada sekolah di wilayah pedesaan dan 3T yang menghadapi keterbatasan infrastruktur serta kendala adaptasi pedagogis. Kondisi tersebut diperparah oleh beban administrasi digital yang menyita waktu produktif guru dan mendorong budaya formalitas akuntabilitas, sehingga mengurangi kesempatan untuk memberikan pendampingan belajar secara optimal. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam (MPI), kesenjangan antara kebijakan dan praktik tersebut mencerminkan ketidakselarasan antara perkataan dan perbuatan sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an Surah As-Saff ayat 2–3. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan perlu berlandaskan nilai amanah, shidq, dan itqan melalui penyederhanaan birokrasi dan administrasi guru serta penguatan kepemimpinan instruksional kepala sekolah yang berorientasi pada keteladanan (uswatun hasanah), sehingga pendidik dapat kembali menjalankan perannya sebagai mu'addib dan murabbi dalam mengembangkan potensi peserta didik serta mewujudkan implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih substantif.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

Penggunaan Generative AI

Penulis menyatakan bahwa tidak menggunakan alat kecerdasan buatan generatif (Generative AI) dalam proses persiapan, analisis, maupun penulisan manuskrip ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, 3rd ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
[2] J. S. Machi and B. T. McEvoy, The Literature Review: Six Steps to Success, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Corwin, 2016.
[3] A. S. Dakhi, "Implementasi Kurikulum Pembelajaran di Sekolah," Jurnal Pendidikan Indonesia, vol. 1, no. 2, 2020.
[4] J. I. Goodlad, Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice. New York: McGraw-Hill, 1979.
[5] A. C. Ornstein and F. P. Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 7th ed. Boston: Pearson, 2018.
[6] F. M. Connelly and D. J. Clandinin, Teachers as Curriculum Planners: Narratives of Experience. New York: Teachers College Press, 1988.
[7] W. Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana, 2015.
[8] P. Sahlberg, Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?. New York: Teachers College Press, 2011.
[9] W. B. Schubert, Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility. New York: Macmillan Publishing Company, 1986.
[10] M. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
[11] S. M. N. al-Attas, Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993.
[12] M. A. Alsubaie, "Curriculum Implementation: Measures of Success, Structures and Roles," Journal of Education and Practice, vol. 7, no. 24, pp. 62–67, 2016.
[13] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2024.
[14] Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI, Laporan Komprehensif: Rapor Pendidikan Indonesia 2025: Capaian dan Agenda Perbaikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025.
[15] Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Dokumen Rekomendasi Kebijakan Hasil Asesmen Nasional dan Profil Satuan Pendidikan dengan Capaian AKM. Jakarta: Kemendikbudristek, 2024.
[16] M. Murtiningsih and M. Muslim, "Analisis Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka," Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI), vol. 5, no. 1, pp. 22–35, 2023.
[17] D. D. Prianti, "The Challenge of Implementing Merdeka Belajar Curriculum in Indonesian Schools," Jurnal Pendidikan Islam, vol. 8, no. 2, pp. 145–156, 2022.
[18] S. Bahri, "Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya," Jurnal Ilmiah Islam Futura, vol. 11, no. 1, pp. 15–34, 2017.
[19] A. Pahrudin, Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam: Prinsip, Strategi, dan Implementasi Kontemporer. Lampung: Raden Intan Press, 2020.
[20] S. Rahmi, Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah dalam Transformasi Mutu Pendidikan Dasar. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
[21] H. Fahmi, "Manajemen Otentik Berbasis Nilai Islam dalam Pengelolaan Kurikulum Madrasah," Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, vol. 9, no. 2, pp. 112–125, 2021.
[22] N. K. Rahmawati, "Evaluasi Dampak Beban Administrasi Digital Terhadap Kinerja Pedagogis Guru Kelas Sekolah Dasar," Jurnal Ilmiah PGSD, vol. 10, no. 3, pp. 312–326, 2024.
[23] A. R. Sani and M. I. Sulaiman, "Hidden Curriculum dan Dinamika Birokrasi Akuntabilitas di Institusi Pendidikan Dasar," Jurnal Tata Kelola Pendidikan, vol. 6, no. 1, pp. 45–59, 2023.
[24] B. Setiawan, "Analisis Disparitas Hasil ANBK Antara Wilayah Urban dan 3T Berdasarkan Perencanaan Berbasis Data," Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional, vol. 4, no. 2, pp. 88–101, 2024.
[25] M. Yusuf, "Kritik Teologis Pendidikan Performatif: Tafsir Tematik Kemurkaan Allah atas Pengabaian Tindakan Nyata," Jurnal Studi Al-Qur'an dan Peradaban, vol. 14, no. 2, pp. 201–215, 2022.
[26] T. Haryati, "Implementasi Nilai Itqan dan Shidq dalam Manajemen Kurikulum Aktual Sekolah Islam Terpadu," Jurnal Pendidikan Karakter, vol. 13, no. 1, pp. 14–27, 2023.
[27] F. Fatimah, "Evaluasi Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar: Antara Jargon Regulasi dan Realitas Kelas," Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran, vol. 8, no. 2, pp. 132–146, 2023.

[28] Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Dasbor Statistik Nasional Rapor Pendidikan Indonesia. [Online]. Available: https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id. [Accessed: May 20, 2025].
[29] M. I. Sholeh, M. Habibulloh, A. Syafi'i, Sokip, Sulistyorini, M. Arif, Sahri, Munif, and N. 'Azah, "Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Pembelajaran Literasi dan Numerasi di Sekolah Dasar dan PAUD," The Elementary Journal, vol. 3, no. 2, pp. 38–51, Oct. 2025, doi: 10.56404/tej.v3i2.160.
[30] N. Efendi, "Visionary Leadership in the Implementation of the Merdeka Curriculum to Foster Student Character and Learning Autonomy in Elementary Schools," The Elementary Journal, vol. 2, no. 1, pp. 40–46, Apr. 2024, doi: 10.56404/tej.v2i1.101.
[31] A. D. Febrianto, "Penguatan Karakter Siswa Melalui Penerapan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin," The Elementary Journal, vol. 3, no. 2, pp. 83–94, Oct. 2025, doi: 10.56404/tej.v3i2.161.
[32] A. Qak and I. Shofiana, "The Evaluation of the Islamic Education Learning System Using the CIPP Model to Improve the Human Development Index at SDN Banjaran 2 in Kediri City," The Elementary Journal, vol. 4, no. 1, pp. 57–64, Apr. 2026, doi: 10.56404/tej.v4i1.266.